

**PERANAN ODITUR MILITER IV-17 MAKASSAR DALAM P4GN  
(PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA) DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
(UIN) Alauddin Makassar**

**Oleh :**

**ASLINDA RAHAYU**  
**NIM. 10400115050**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2019**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Gowa, 25 Juni 2019

Penyusun,



Aslinda Rahayu

Nim:10400115050

**LEMBAR PENGESAHAN  
DRAFT SKRIPSI**

**“(Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar)”**

Disusun dan diajukan Oleh :

**Aslinda Rahayu**

NIM : 10400115050

Telah disetujui oleh pembimbing untuk melanjutkan  
penulisan skripsi

Pada tanggal : 22 April 2019

**DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING**

Pembimbing I



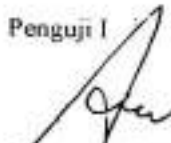
**Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H**  
NIP. 19821207 200901 1 010

Pembimbing II



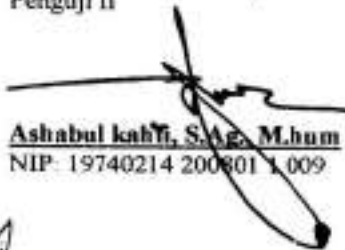
**Dr. Andi Safriani, S.H., M.H.**  
NIP. 19831122 200912 2 002

Penguji I




**Istiqomah, S.H., M.H**  
NIP. 196801120 199503 2 001

Penguji II



**Ashabul kahfi, S.Ag., M.hum**  
NIP. 19740214 200801 1 009

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



**Istiqomah, S.H., M.H**  
NIP. 196801120 199503 2 001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar



**Prof. Dr. Darussalam, M.Ag**  
NIP. 19621016 199003 1 003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar"**, yang disusun oleh Aslinda Rahayu, NIM: 10400115050, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.


Samata 02 Juli 2019 M  
28 Syawal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....  )
Sekretaris	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....  )
Munaqisy I	: Istiqamah, S.H.,M.H	(.....  )
Munaqisy II	: Ashabul Kahfi, S.Ag.,M.Hum	(.....  )
Pembimbing I	: Dr.Rahman Syamsuddin S.H.,M.H	(.....  )
Pembimbing II	: Dr.Andi Safriani, S.H.,M.H	(.....  )

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar, /

  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang lurus sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Karya tulis ilmiah ini berbentuk skripsi dengan judul “Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) di wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar”, merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Strata satu (S1) program studi ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temukan dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah penulis dapat mengatasi dan menyelesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tidak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda H. Ilyas dan Ibunda Astaty Serta kakak-kakak penulis Hj. Asma wati, Aras, dan Asriadi yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang terdalem dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.SI. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Ibu Istiqomah, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar;
4. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan ibu Dr. Andi Safriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Kedua beliau, ditengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Istiqomah, S.H., M.H. selaku penguji I dan bapak Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H. selaku penguji II yang senantiasa memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
7. Bapak Oditur Militer IV-17 Makassar terima kasih atas izin meneliti serta masukan dan bimbingan yang telah diberikan;
8. Kepada teman seperjuangan Miftahul Jannah, Nurul Hikmayani Razak S.H, Aidah Apriani, dan Rezky Ridhoyanti S.H, Teman seperjuangan yang tak pernah kenal lelah, Musfita Sari, Syurah Masyurah S.H, A. Astrid Surya Ramadhani, Mahdiyyah, Ratna Febriani, Hilmiah, Hajrahwati Gama, Dedi Aswandi.
9. Keluarga Besar Ilmu Hukum B 2015, dan Keluarga Besar VIN15 terima kasih atas motivasi serta dukungan yang selama ini diberikan.
10. Kepada team Yakult Griya zan zan, Asrah Rizal, Wirawan, yang telah memberikan dukungan dalam skripsi ini.

11. Seluruh teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 60 Posko Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam pengerjaan skripsi ini;

12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan, Kerjasama , uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah SWT.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa apabila terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga .

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 8 Mei 2019

Penulis,

**Aslinda Rahayu**  
**Nim: 10400115050**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
A. Oditur.....	11
B. Oditur Militer.....	15
C. Narkotika .....	18
D. Pengadilan Militer .....	33
E. Tindak Pidana .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Data .....	42
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Tugas Pokok Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) .....	45



B. Proses Penyelesaian Perkara Prajurit TNI yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **ABSTRAK**

**NAMA** : Aslinda Rahayu  
**NIM** : 10400115050  
**JURUSAN** : Ilmu Hukum  
**JUDUL SKRIPSI** : “Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar”.

---

Skripsi ini membahas tentang Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalaghunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah apa sajakah tugas pokok Oditur Militer IV-17 Makassar dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) di wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar dan permasalahan kedua yaitu bagaimana proses penyelesaian perkara prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum pengadilan militer III-16 makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas pokok oditur IV-17 makassar dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Pengadilan Milite III-16 Makassar.

Penelitian ini dilaksanan di Oditurat Militer IV-17 Makassar dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis –empiris yaitu satu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Oditur Militer IV-17 makassar dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu sebagai aparat penegak hukum di lingkunga TNI melaksanakan kekuasaan pemerintahan Negara di bidang penuntutan dan penyidikan. Peranan oditur militer dalam pencegahan penyalahgunaan tidak pidana narkotika yaitu berupa penuntutan hukuman yang seberat-beratnya agar dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit TNI yang menggunakan narkotika.

Mengenai proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer dimulai dengan Penyelidikan, Penyidikan, kemudian pemeriksaan terdakwa dilakukan oleh POM (Polisi Militer), kemudian berkas hasil pemeriksaan di limpahkan ke Otmil (oditurat Militer), untuk di buat berita acara pendapat dan surat dakwaan, setelah semua kelengkapan administrasi dilengkapi maka berkas perkara diserahkan ke Pengadilan Militer untuk di proses lebih lanjut di persidangan.

**Kata Kunci** : Peranan Oditur, P4GN, Pengadilan Militer

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang tercantum dalam Dasar Negara yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum adalah tingkahlaku suatu masyarakat, mengatur tentang dimana daya penggunaannya pada saat tertentu diterima oleh warga masyarakat untuk kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.<sup>1</sup> Hukum seharusnya dipandang sebagai sarana yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik serta perangkat yang harus dipatuhi dan di pandang oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Didalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita jumpai berbagai macam kasus kejahatan yang ada pada masyarakat, seperti salah satu diantaranya adanya tindak kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Yang di mana kita ketahui bahwa Narkotika dan Psikotropika merupakan obat-obatan yang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang menangani kasus tindak pidana dibantu oleh aparatur Negara yakni kepolisian, kejaksaan serta pengadilan. Aparatur Negara tidak hanya meliputi pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, melainkan juga Aparatur Militer.<sup>3</sup>

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga

---

<sup>1</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum “Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis”* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 34.

<sup>2</sup>Romli Atmasasmita, “Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trisakti Edisi III, Nomor 1 Tahun 2012*, h. 1.

<sup>3</sup>Kusno Adi., “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak”, (Malang: UMM Press, 2009), h. 30.

angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 disebutkan bahwa tugas pokok TNI (Tentara Nasional Indonesia) ada 3 yaitu menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari gangguan dan ancaman tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk perang (OPM) dan Operasi Militer Selain Perang (OMPS). Tugas TNI ini sangat penting sehingga dibuat aturan khusus dalam suatu undang-undang untuk menjamin hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

Oleh karena itu dengan adanya beban kewajiban sebagai inti dalam pembelaan Negara, pertahanan Negara. Dengan adanya ketangguhan maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam menjaga keutuhan organisasi. Untuk menjaga integritas TNI (Tentara Nasional Indonesia) serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas militer yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegaknya dan runtuhnya suatu Negara, Maka selain peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat.

Mengapa diadakan hukum khusus dan lebih keras dan berat bagi anggota tentara karena:

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum misalnya, *Deserse*, menolak perintah dinas, insubordinasi dan sebagainya.
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa apabila dilakukan oleh anggota tentara di dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum di anggap terlalu ringan.
3. Jika soal-soal tersebut didalam dimasukkan kedalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan ketentuan ini hanya

---

<sup>4</sup>*Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer.*

tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat , juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan militer.<sup>5</sup>

Dengan adanya hukum khusus yaitu hukum pidana militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Di pandang dari segi hukum bahwa militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Sebagai warga Negara, bagi militer diberlakukan semua ketentuan yang berlaku baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Di dalam Pasal 1 KUHPT berbunyi:

Pada waktu memakai kitab undang-undang ini, berlaku aturan-aturan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari hukum pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang.

Di perlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu. Jika hanya diberlakukan hukum pidana umum ancaman hukuman yang di rasakan terlalu ringan, misalnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) didalam lingkungan militer.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP di tentukan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Tuntutan pidana oleh Oditur Militer bertujuan untuk menetapkan pidana yang diharapkan akan diputus oleh hakim pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada Pasal 64, mengenai tugas dan wewenang oditur militer yaitu sebagai penuntut umum, yang seharusnya berperan secara professional yaitu memberikan tuntutan yang seberat beratnya kepada TNI yang menggunakan narkoba agar dapat memberikan efek jera serta dapat meminimalisir TNI yang menggunakan narkoba.

Namun pada kenyataan yang terjadi bahwa oditur dalam memberikan tuntutan kepada terdakwa masih kurang efektif, oditur memberikan tuntutan kepada

---

<sup>5</sup>Moch. Faisal Salam, "Peradilan Militer Indonesia" (Bandung: Mandar Maju, 2004) h. 21.

<sup>6</sup>Moch. Faisal Salam, "Peradilan Militer Indonesia" h. 52.

terdakwa yaitu tuntutan minimum dari peraturan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba.

Yang seharusnya agar memberi efek jera kepada prajurit TNI yang menggunakan narkoba. Oditur harus bekerja dengan profesional yaitu dengan memberikan tuntutan maksimum kepada prajurit TNI yang menyalahgunakan narkoba,

Salah satu contoh kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba berikut ini. Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari kesatuan kodim 1415/Selayar bernama sertu Muh. Alif Bahar . NRP 21100147070189 yang menjabat sebagai Bati Komsos. Bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana narkoba sebagai pengguna sekaligus pengedar. Seharusnya anggota TNI harus menjaga nama baik kesatuan karena dengan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI akan mencoreng nama Baik TNI di mata Masyarakat dalam hal ini sistem hukum pengadilan militer Indonesia mengacu pada Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer.<sup>7</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain yaitu

1. Faktor individu adanya rasa penasaran dan rasa ingin tau yang menimbulkan keinginan untuk mencoba.
2. Faktor lingkungan, beberapa orang kadang salah pengertian bahwa mencoba sekali-sekali tidak masalah, ajaka teman dan tawaran gratis untuk mencoba serta lingkungan yang mendukung untuk kebebasan memakai.
3. Faktor pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakai secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini

---

<sup>7</sup> Berkas perkara, *Tindak Pidana Narkoba*, Pengadilan Militer III-16 Makassar

semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk kalangan generasi muda. Narkoba mampu menyentuh dan merambah keseluruhan lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara pada masa mendatang.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa dan Negara. Adapun dampak penyalahgunaan narkoba yaitu mengganggu kesehatan dan fisik, psikis yaitu hilangnya kepercayaan diri, dikucilkan oleh lingkungan, pendidikan menjadi terganggu, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*) terlebih peredaran gelap narkoba bersifat lintas Negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.<sup>9</sup> Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian kewaspadaan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus di tingkatkan dan lebih mempertegas dalam penerapan sanksi pidana dalam memberikan efek jera pada terdakwa.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dipandang penting oleh penulis untuk melakukan penelitian dan penelaan secara mendalam tentang: ***“Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar dalam P4GN (Pencegahan,***

---

<sup>8</sup> Kusno Adi, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak, (Malang: UMM Press, 2009), h. 30.

<sup>9</sup> BNN, Hari Anti Narkoba Internasional <http://www.bnn.go.id/pressrelease/13087/hari-anti-narkoba-internasional>, terakhir diakses 1 Mei 2016, pukul 12.00 WITA

***Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar”.***

**B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diuraikan, maka akan dipaparkan mengenai batasan-batasan yang menjadi fokus penelitian, dan deskripsi fokus ini:

**1. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah peranan Oditur Militer IV-17 Makassar dalam P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) serta proses penyelesaian perkara prajurit TNI yang melakukan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum pengadilan militer III-16 Makassar.

**2. Deskripsi Fokus**

a. Pengertian Peranan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

b. Pengertian Oditur

Oditur adalah penuntut umum, terutama dalam pengadilan militer . fungsinya seperti jaksa dalam peradilan militer. Oditur pada pengadilan militer biasa disebut oditur, sedangkan oditur pada peradilan militer tinggi disebut oditur tinggi dalam persidangan militer terdapat hakim majelis,oditur,panitera. Oditur inilah yang membacakan kesalahan dan sanksi atas kesalahannya itu menurut UU, yang kemudian dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim majelis.

c. Pengadilan

Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan pengadilan di lingkungan pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran.



d. Pengertian Militer

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu Negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata.

e. Pengertian Narkotika.

Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun non sintesis yang dapat mengakibatkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan juga dapat menimbulkan ketergantungan.

f. Pengertian P4GN

P4GN adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba untuk itu diperlukan kepedulian dari seluruh instansi pemerintah dalam upaya tersebut dengan mendorong satgas di instansi pemerintah menjadi pelaku P4GN secara mandiri.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian Latar Belakang yang telah di tuliskan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah tugas pokok oditur militer IV-17 Makassar dalam P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum pengadilan militer III-16 Makassar?

**D. Kajian Pustaka**

1. Subagyo Partodiharjo dalam bukunya *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya* menjelaskan tentang bagaimana populernya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat hingga bahaya dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Buku ini sangat

penting untuk di jadikan referensi untuk penyelesaian penyusunan penelitian penulis.

2. Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya *Hukum Narkotika Indonesia* menjelaskan tentang pengertian hukum dan perannya, ketentuan hukum penggunaan dan penanggulangan peyalahgunaan narkotika di Indonesia serta ketentuan dalam pengangkutan narkoba. Buku ini sangat sesuai dan relevan untuk dijadikan sebagai referensi yang mendukung penelitian penulis..
3. Buku yang di tulis oleh MUH. FAISAL SALAM, S.,H.M.H. yang berjudul *Hukum Pidana Militer di Indonesia* dalam Buku ini memberikan gambaran pengertian hukum pidan militer,di siblin militer dan uraian kandungan buku II Kitab undang-undang hukum pidana militer.
4. Hari Sasangka dalam bukunya *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* menjelaskan tentang sifat dan zat yang terkandung dalam narkotika serta dampak yang di rasakan oleh pecandu narkotika. Buku ini sangat penting dalam untuk di jadikan referensi untuk membantu penulisan skripsi ini.
5. Buku yang di tulis oleh Amiroeddin Sjarit yang berjudul *Hukum Disiplin Militer Indonesia* dalam buku ini membahas tentang pengertian hukum pidana militer dan disiplin militer dalam peperangan buku ini sangat membantu dan dapat menjadi reverensi untuk penelitian penulis.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peranan tugas pokok oditur militer IV-17 makassar dalam pelaksanaan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di wilayah huku pengadilan militer III-16 makassar

- b. Untuk mengetahui memahami serta menjelaskan bagaimana proses penyelesaian perkara prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum pengadilan militer III-16 Makassar

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan secara ilmiah dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang positif dan aktual bagi pengembangan ilmu serta menambah pengetahuan terutama di bidang ilmu-ilmu hukum pidana militer.

- b. Kegunaan Praktis

Dapat mengetahui dan memahami fakta yang terjadi dalam wilayah Hukum pengadilan militer.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **A. *Oditurat Militer***

##### **1. Pengertian Oditur**

Oditurat adalah badan di lingkungan Militer yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia. Oditur di lingkungan Peradilan Militer berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu atas perintah Oditur Jendral, melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara diserahkan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, dan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penyidikan, penyerahan perkara, penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, baik dalam lingkungan Hukum Militer maupun Hukum Sipil, mempunyai prosedur atau tata urutan yang hampir sama, yakni dari penyidik diserahkan ke kejaksaan yang kemudian diteruskan ke Pengadilan untuk dipersidangkan. Tetapi dalam hukum militer masih harus mendapatkan suatu keputusan dari perwira selaku atasan dari militer yang melakukan tindak pidana agar perkara tersebut oleh Oditur Militer bisa diajukan ke pengadilan militer. Istilah jaksa inilah yang dalam hukum militer disebut sebagai Oditur Militer. Secara Garis Besar fungsi, kedudukan dan peranan antara jaksa dalam hukum sipil dengan Oditur Militer dalam Hukum Militer tidak jauh berbeda, yaitu sebagai penuntut umum dalam persidangan perkara pidana. Tetapi dalam Peradilan Militer, Oditur Militer juga mempunyai peranan sebagai penyidik, selain penyidik utama yaitu Atasan Langsung Yang Berhak Menghukum (ANKUM) dan Corps Polisi Militer (CPM) hanya untuk kasus-kasus tertentu yang berdasarkan atas keputusan panglima

## 2. Pengertian Militer

Kata militer berasal dari “*miles*” dari bahasa Yunani yang artinya seseorang yang bersenjata dan siap untuk melakukan peperangan untuk memperthankan dan mengamankan Bangsa dan Negara dari ancaman luar negri maupun dalam negri. Dalam perundang-undangan dapat dibedakan menjadi dua macam militer, yakni: militer sukarela dan militer wajib.<sup>10</sup>

Tetapi di dalam keadaan perang sesuai dengan ketentuan hukum perang dibuka kebolehan bagi rakyat untuk turut angkat senjata, dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mereka bisa juga disebut sebagai sukarelawan lainnya.

### a. Militer Sukarela (*Milsuk*)

Seseorang berstatus militer setelah dia menandatangani surat ikatan dinas dalam jangka waktu tertentu. Masa pendidikan pertama tidak terhitung Sejak penandatanganan itu berlaku baginya hukum militer.

### b. Militer Wajib (*Milwa*) dan militer wajib darurat

Seseorang yang berstatus militer (dalam dinas) sejak mulai hari laporan datang yang ditentukan oleh komandan kesatuan.

### c. Sukarelawan lainnya

Persyaratan analog dengan tersebut 13b, perbedaannya bahwa 13b diwajibkan oleh pemerintah agar supaya dia memasuki dinas militer, sedangkan tersebut 13c dalam keadaan perang, yaitu atas kesadaran dan keinginan sendiri baik karena ada anjuran dari pemerintah, ataupun karena merasa tedirinya sebagai warga negara yang baik. Sedangkan kesukarelaannya bisa juga ada persamaannya dengan hal tersebut namun dia tidak menandatangani suatu ikatan dinas untuk waktu tertentu.

Militer Sukarela dilarang melakukan jabatan, diberhentikan sementara dari jabatan atau ditetapkan non aktif dari jabatan. Menurut Pasal 15 sampai dengan 22 jo.

---

<sup>10</sup>Amiroeddin Sjarit, *Hukum Disiplin militer Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1999), h. 21.

Ps.25 Perpem no. 37 Th. 1959 LN. No. 59 Th. 1959, (Peraturan tentang kepangkatan dalam jabatan Militer Sukarela), terhadap seseorang militer sukarela dalam keadaan:

1. Dikarenakan larangan melakukan jabatan (untuk kepentingan dinas dan /atau disiplin).
2. Pemberhentian sementara (karena melakukan perbuatan yang merugikan dan bisa merugikan angkatan perang, mereka berada dalam penahanan justisial, dan dapat menjalani pidana perampasan kemerdekaan).
3. Pernyataan non aktif dari jabatan (menerima pencalonan untuk anggota DPR/MPR/Konstituante, mendapat tugas belajar, akan dikembalikan ke masyarakat/masa persiapan pensiun), masih tetap berada dalam hubungan organik dan administratif Angkatan Perang dan tetap berlaku hukum pidana dan disiplin militer dan tetap dalam yuridiksi peradilan militer.

Pengertian tentara secara formilnya menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46, 47, dan 49 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara Militer.

Pasal 46:

Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1958, Undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undang-undang No. 14 Tahun 1962 dan perpem Np. 51 Tahun 1963).

Yang dimaksud dengan Militer adalah:

1. Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
2. Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

Pasal 47:

Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal diatas.

Pasal 49:

Termasuk juga dalam pengertian militer:

1. (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Perpem No. 51 Tahun 1963) Para Bekas militer yang dipergunakan untuk dinas militer.
2. Komisaris-komisaris militer berkewajiban berpakaian seragamtentara , setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.
3. (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Para Perwira yang berstatus pensiun anggota dari suatu peradilan militer, setiap kali mereka melakukan dinas demikian.
4. (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Undang-undang No. 74 Tahun 1957 jo No. 323 PRP/1959) Mereka yang memakai pangkat militer tituler yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, atau keadaan yang berbahaya terhadap mereka yang diberikan oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Keadaan Bahaya (Undang-undang No. 23/PRP/1959) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.

Di dalam Pasal 45 KUHPM, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional).
2. Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).

3. Angkatan udara dan militer wajib termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Angkatan perang merupakan wadah bagi orang-orang yang ditugaskan untuk berperang, maka Pasal 46 dan 47 merupakan penegasan siapa-siapa orangnya yang termasuk di dalam wadah tersebut.

### **3. Pengertian Oditur Militer**

Oditur Militer yaitu pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan. Sebagai pejabat fungsional Oditur Militer bertindak sebagai wakil kesatuan pemerintah dan negara. Dengan demikian, pelaksanaan penuntutan juga harus memperhatikan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat pada umumnya dan di lingkungan Tentara Militer Indonesia pada khususnya serta arah penuntutan harus diselaraskan dengan kebijaksanaan pemerintah, negara dan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam penanganan perkara pidana. Untuk meneguhkan kehormatan, kewibawaan, dan keahlian teknis.<sup>11</sup>

Oditur dalam lingkungan Peradilan Militer, perlu dijaga kualitas kemampuannya dengan ditetapkannya syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentiannya dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima (Faisal Salam, 2004 : 81).

### **4. Peranan Oditurat Militer.**

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan macam-macam Oditurat dalam lingkungan hukum militer:

1. Oditurat Militer.

---

<sup>11</sup> Mulya Sumaperwata, S.H., M.H., *Hukum Acara Peradilan Militer (Bogor :Alumnus Press, 2007), h. 89.*



2. Oditurat Militer Tinggi.
3. Oditurat Jendral.
4. Oditurat Militer Pertempuran.

Adapun tugas dan wewenang Oditurat sesuai dengan yang tercantum dalam Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1997:

1. Oditurat Militer.

Oditurat Militer merupakan badan atau lembaga penuntutan pada tingkat pengadilan militer. Tugas dan wewenang Oditurat Militer yaitu untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana oleh militer yaitu:

- a. terdakwa mempunyai kriteria :
  - Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
  - Mereka yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit yang termasuk tingkat kepangkatan Kapten ke bawah.
  - Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang sama serta dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang yang termasuk tingkat kepangkatan Kapten ke bawah.

Bagi mereka yang disetarakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang–Undang, penentuan tingkat kepangkatan Kapten kebawah didasarkan atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Salah satu contoh yaitu orang sipil yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/C setingkat kepangkatannya dengan Kapten.<sup>12</sup>

Selain melakukan penuntutan, Oditur Militer juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, melakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan tambahan yang dilakukan terhadap tersangka atau saksi guna melengkapi berkas perkara untuk memenuhi

---

<sup>12</sup>Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, h. 125.

persyaratan penuntutan baik formal maupun material, serta dapat melakukan penyidikan yaitu penyidikan yang sejak awal dilakukan sendiri oleh Oditur Militer atas perintah Oditurat Jendral baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana tertentu.

Dalam persidangan di Peradilan Militer, Oditur Militer serendah–rendahnya harus berpangkat Kapten atau setingkat lebih tinggi dari terdakwa yang diajukan ke Pengadilan Militer.

## 2. Oditurat Militer Tinggi.

Tugas dan wewenang Oditurat Militer Tinggi hampir sama dengan tugas Oditurat Militer. Perbedaannya terletak padapenuntutan yang dilakukan terhadap terdakwa yang mempunyai kriteria:

- a. Prajurit yang menjadi terdakwa atau salah satu terdakwa berpangkat Mayor ke atas.
- b. Mereka yang berdasarkan Undang–Undang dipersamakan dengan prajurit yang menjadi terdakwa atau yang salah satu terdakwa termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas.
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang–Undang yang menjadi terdakwa atau salah satu terdakwa
- d. Termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas.

Mereka yang dipersamakan dan dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang–Undang, penentuan tingkat kepangkatan Mayor ke atas berdasarkan atas keputusan Panglima dengan persetujuan menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi. Contohnya yaitu Pegawai Negeri Sipil golongan IV/A yang setingkat kepangkatannya dengan Mayor.

Oditur Militer Tinggi yang melaksanakan penuntutan pada tingkat Pengadilan Militer Tinggi ini serendah–rendahnya harus berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) atau setingkat lebih tinggi dari terdakwa. Selain itu tugas dan wewenangnya sama

dengan tugas dan wewenang Oditur Militer, yakni melaksanakan ketetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Peradilan Umum, melakukan pemeriksaan tambahan dan dapat pula melakukan penyidikan. Nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Oditurat Militer Tinggi di tentukan oleh Keputusan Panglima.

### 3. Oditurat Jendral.

Oditurat Jendral Angkatan Bersenjata merupakan Badan Penuntutan tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata.

### 4. Oditurat Militer Pertempuran

Oditurat Militer Pertempuran merupakan Badan Penuntutan pada pengadilan militer pertempuran.

## **B. *Narkotika***

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkotika (Narkotika dan Obat- obatan berbahaya). Selain itu ada juga istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkotika atau NAPZA. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dibagi ke dalam perundang-undangan yang baru.

### **1. Definisi Narkotika**

Pada umumnya pengertian narkotika adalah suatu kelompok zat yang apabila di konsumsi dalam tubuh maka akan berpengaruh pada tubuh seseorang tersebut yang bersifat Menenangkan, Merangsang, Menimbulkan khayalan tinggi.

Secara Etimologi narkoba berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang artinya membius.<sup>13</sup>

Sifat dari zat tersebut sangat berpengaruh pada otak sehingga dapat menimbulkan perubahan pada sifat, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi. Yang mendasari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat dilihat dari pengertian Narkoba itu sendiri yaitu: pada Pasal 1 point 1 Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Pendapat dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat menjelaskan bahwa: narkoba adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yaitu morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Kemudian termasuk juga narkoba sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallusinogen, Depressant dan Stimulant.

Di bawah ini adalah beberapa pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkoba:

- a. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff berpendapat bahwa:  
*“Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetic opiates (meperidine, methadone).”*<sup>14</sup>

Artinya yaitu:

Narkoba adalah zat-zat (obat) yang bisa menimbulkan perbedaan atau pembiusan dikarenakan adanya zat-zat yang bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam artian narkoba ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintetis (meperidine, methadone).

- b. Narkoba Menurut Sudarto

---

<sup>13</sup>Moh. Taufik Makarao, “Tindak Pidana Narkoba” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 21.

<sup>14</sup>Hari Sasangka, “Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana” (Bandung: Maju Mundur, 2003), h.33.

Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang artinya terbius sehingga tidak merasakan sesuatu hal. Dalam **Encyclopedia Amerikana** juga ditemukan pengertian “*narcotic*” sebagai:

“*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep an can produce addiction in varying degrees*” sedang “*drug*” artinya bahwa: *Chemical agen that is used therapeutically to treat disease/Morebroadly, a drug maybe delined as any chemical agen attecis living protoplasm.*

Narkotika merupakan suatu bahan yang dapat menimbulkan rasa penghilang rasa nyeri.<sup>15</sup>

#### c. Pengertian Narkotika Menurut Soedjono. D

Narkotika ialah zat yang dapat memberikan pengaruh-pengaruh tertentu bagi siapapun yang memakainya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh zat pada tubuh berupa pembiusan, hilangnya rasa nyeri, tingkat semangat yang tinggi dan berhalusinasi. Hal tersebut ditemukan dalam dunia medis tujuannya agar dapat dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan seseorang, contohnya di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.<sup>16</sup>

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat di bedakan jenis-jenis penggolongannya yaitu sebagai berikut:

#### a. Narkotika golongan I:

Yaitu Narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa, dan juga berpotensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

<sup>15</sup>Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, “Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara” (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 480.

<sup>16</sup>Soedjono. D, “Hukum Narkotika Indonesia” (Bandung: Penerbit Alumni, 1987), h.3.

<sup>17</sup>Subagyo Partodiharjo, “Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya”, (Jakarta: PT. Gelora Aksara, 2014), h.100-102.

- 2) Opium mentah, adalah getah yang membeku sendiri, dihasilkan dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
  - 3) Opium masak terdiri dari:
    - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
    - b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
    - c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
  - 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
  - 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  - 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
  - 7) Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
  - 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- b. Narkotika golongan II:
- Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Antara lain seperti:

- 1) Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-defenilheptana
- 2) Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- 3) Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- 4) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

c. Narkotika golongan III:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

- 1) Asetildihidrokodeina
- 2) Dekstropropoksifena :  $\alpha$ -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionate.
- 3) Nikokodina : 6-nikotinilkodeina.
- 4) Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida.
- 5) Buprenorfina : 21-siklopropil-7- $\alpha$ -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina.
- 6) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas.
- 7) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
- 8) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.<sup>18</sup>

### 3. Penyalahgunaan Narkotika

Gardon mendefenisikan penyalahgunaan ialah orang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkotika. Masalah seperti itu biasanya ada dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Kemudian definisi dari

---

<sup>18</sup>Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: PT Gelora Aksara, 2014), h.105-107.

kementerian Sosial yang mengatakan penyalahgunaan narkoba ialah penggunaan dari seseorang selain tujuan pengobatan maupun ilmu pengetahuan.<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan arti serta penjelasan yang kurang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, yang dapat dilihat berdasarkan undang-undang tersebutnya istilah penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.<sup>20</sup>

Yang di terapkan dalam batasan mengenai penyalahgunaan, baik oleh Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*), tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.<sup>21</sup> Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat 5 sub (b) bahwa:

*“A Party shall, if in its opinion the prevailing conditions in its country render it the most appropriate means of protecting the public health and welfare, prohibit the production, manufacture, export and import of, trade in, possession or use of any such drug except for amounts which may be necessary for medical and scientific research only, including clinical trials therewith to be conducted under or subject to the direct supervision and control of the Party.”*

Yang artinya adalah:

“Suatu Pihak wajib, berdasarkan kondisi yang berlaku di negaranya maka menurut pendapatnya itu cara yang paling tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor,

<sup>19</sup><http://journal.uin-alauudin.ac.id/index.php/Jurisprudentie>

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>21</sup> Muhammad ali imran, “Efektivitas Kinerja Bnnp Sulsel”, ( Makassar: 2016), h. 34.



perdagangan, pemilikan atau penggunaan narkotika apapun kecuali seperti untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah saja, termasuk uji klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada pengawasan dan kontrol langsung dari pihak tersebut.”

Sementara Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestik setempat (dari negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan.<sup>22</sup>

Begitu besarnya akibat dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sesuai dengan amanat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan dan Bidang Hukum dan Kerja sama.<sup>23</sup>

#### 4. Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Narkotika

Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana golongan I telah ditentukan dalam pasal 111 sampai dengan pasal 116 dan pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagai berikut :

- a. Memelihara, Memiliki, Menyimpan , atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama.

<sup>22</sup>Subagyo Partodiharjo, “Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya”, (Jakarta: PT. Gelora Aksara, 2014), h.103-104.

<sup>23</sup><http://journal.uin-alauudin.ac.id/index.php/Jurisprudentie>

- b. Sanksi pidana bagi pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, Menyimpan, menguasai , atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 Gram.<sup>24</sup>

## **5. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika**

### **a. *Promotif***

Program *promotif* atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum mengenal serta memakai narkotika. Prinsipnya yaitu agar masyarakat secara nyata lebih sejahtera dengan cara meningkatkan peranan dan kegiatan kelompok. sehingga tidak pernah berpikir untuk memakai narkotika sebab penggunaanya hanya dapat memperoleh kebahagiaan semu.

Membentuk program contohnya seperti pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olah raga seni budaya, atau kelompok usaha. Pengutamaan pada program *preemtif* yaitu meningkatkan kualitas kinerja sehingga dapat lebih bahagia dan sejahtera. Pengenalan terhadap masalah narkotika hanya peringatan.

### **b. *Preventif* (Pencegahan)**

Program ini untuk masyarakat sehat yang belum mengenal narkotika agar masyarakat dapat mengetahui dampak negative dari narkotika tersebut. Bentuk kegiatan seperti penyuluhan anti penyalahgunaan narkotika yaitu program pemberian informasi satu arah (*monolog*) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkotika. Penyuluhan ini bersifat memberi informasi satu arah tanpa adanya Tanya jawab.

Penyuluhan seluk beluk narkotika yaitu materi dengan sistem tanya jawab. Bentuk penyuluhan ini seperti seminar. tujuannya adalah untuk lebih memahami berbagai masalah tentang narkotika sehingga masyarakat dapat lebih tahu sehingga tidak tertarik untuk menggunakan narkotika. Pendidikan dan pelatihan kelompok

---

<sup>24</sup>Muh.Amiruddin, *Jurnal : Pembuktian dalam Tindak Pidana Lalu Lintas, ilmu hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.*  
<http://uinalauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/view/5438>

sebaya (peer group), Agar dapat menyelesaikan masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat tertentu, masyarakat diberikan pendidikan dan pelatihan. Yang menjadi tugas aparat adalah mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat. Tujuannya yaitu agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (precursor) tidak beredar sembarangan. Program ini dapat dikatakan belum berjalan dengan baik dikarenakan jumlah dan kemampuan petugas masih sangat terbatas.

c. *Kuratif* (Pengobatan)

Program ini di khususkan kepada pengguna narkoba. Yang bertujuan untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat dari pemakaian narkoba, serta menghentikan pemakaian narkoba. Pengguna narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral, pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.

Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya kenapa pengobatan pengguna narkoba memerlukan biaya yang sangat besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan ialah kerja sama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita.<sup>25</sup>

d. *Rehabilitatif*

Rehabilitasi yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga untuk pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya untuk pengguna tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Pengguna narkoba bisa mengalami penyakit kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan

---

<sup>25</sup>Subagyo Partodiharjo, "Kenali Narkoba dan Musuh", (Jakarta: Erlangga, 2010), h.100-102.

mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain).

Masalah yang mendasar dan sulit dalam penanganan narkoba adalah mencegah datangnya kambuh/relapse sesudah penderita menjalani pengobatan (*detoksifikasi*). Relaps disebabkan dari perasaan rindu dan keinginan yang kuat (*suggest*) akibat salah satu sifat narkoba, yaitu habitual. Satu-satunya cara yang dianggap efektif adalah dengan rehabilitasi fisik dan mental maka hal ini dapat mencegah datangnya kambuh/relapse. Kesembuhan untuk pemakai psikotropika (ekstasi, shabu, dan sebagainya), rehabilitasi sering berhasil dengan baik hingga dapat sembuh 100%. Pemakai morfin juga banyak yang berhasil sembuh sedangkan pemakai heroin (putaw) jarang yang berhasil sembuh dan sebagian besar gagal. Pemakaian putaw yang dapat berhenti total sangat langka sehingga boleh dikatakan mukjizat. Untuk pemakai campuran (putaw, morfin, dan psikotropika) sekaligus, penyembuhan hampir pasti gagal total.

#### e. *Represif*

Program penindakan terhadap produsen, Bandar, pengedar dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini yaitu program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.<sup>26</sup>

### **6. Jenis-Jenis Pengobatan Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba**

#### a. Pengobatan alternative

Ada Berbagai cara pengobatan alternatif penyembuh ketergantungan narkoba yang bisa dibedakan dalam pengobatan berbasis spiritualitas (agama) dan pengobatan berbasis obat-obatan tradisional. Pengobatan alternatif korban

---

<sup>26</sup>Subagyo Partodiharjo, "Kenali Narkoba dan Musuh, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.105-107.

narkotika oleh masyarakat biasanya hanya tertuju kepada upaya penghentian pemakaian, tidak kepada penyakit ikutan. Pengobatan tersebut juga kurang memerhatikan pembangunan kembali karakter sehingga sering kali gagal karena penderita kambuh (*relapse*) dan memakai lagi.

#### b. Pengobatan medis

Pengobatan substitusi adalah penghentian penggunaan narkotika yang asli dan memberikan “narkotika pengganti” yang kemudian dihentikan pemakaiannya secara bertahap. Narkotika pengganti yang dimaksud yaitu narkotika sintetis yang daya adiktifnya rendah sehingga penderita tidak terlalu tersiksa. Pengobatan ini dilakukan oleh dokter.

Detoksifikasi cara cepat (*rapid detox*) adalah pengobatan ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat modern “cuci darah”, penderita dimasukkan ke dalam ruang ICU dengan pembiusan total. Melalui alat kedokteran modern, darah dibebaskan dari narkotika. Cara ini juga jarang berhasil karena sel otak terlanjur rusak permanen sehingga terjadi *relapse*.

Detoksifikasi alami yaitu pengobatan penderita sakaw oleh dokter atau ahli pengobatan alternatif dengan cara membiarkan terjadinya sakaw. Penderita dibiarkan mengalami penderitaan, hanya saja dijaga agar tidak bunuh diri atau celaka. Dengan cara ini sakaw akan berkurang dan lenyap, cara ini juga sering berdampak positif terhadap pemulihan.

Undang-undang yang sudah ada tentang narkotika adalah UU No. 35 tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusahan dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang berbeda-beda, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkan. Ancaman hukum dapat berupa hukuman mati, hukuman

kurungan ditambah denda, hukuman kurungan dalam penjara atau hukuman denda.

Kendala-kendala yang bisa menyebabkan pelaksanaan undang-undang tidak efektif sehingga masyarakat dapat bersifat apriori, curiga terhadap aparat, malas berpartisipasi, hingga terjadinya main hakim sendiri. Dalam kondisi seperti ini masalah semakin rumit, karena masalah narkoba tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan rendahnya kesejahteraan rakyat dan aparat, rendahnya mental, moral, profesionalisme, dan pengetahuan aparat serta keterbatasan keuangan Negara.

Tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, di antaranya ditegaskan bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa dan negara, sehingga hal tersebut dapat mengancam ketahanan bangsa. Dalam pertimbangannya bahwa gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang semakin meluas serta berdimensi internasional di akibatkan karena semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi .

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997 psikotropika terbagi atas empat golongan, namun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan kedalam golongan narkoba. Dengan demikian saat ini apabila berbicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1997.<sup>27</sup>

Dalam mewujudkan pembangunan nasional perlu dilakukan upaya secara terus menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pemerintah Indonesia memutuskan

---

<sup>27</sup>*Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.*

dan menetapkan undang-undang tentang pengesahan United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic drugs and psychotropic, 1998 pada tanggal 24 maret 1997 berdsarkan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 17.

### C. Pencegahan Narkoba Berbasis Agama

#### 1. Islam dalam Memandang Penyalahgunaan Narkoba

Agama Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak secara langsung menyebut haramnya Narkoba. Namun melihat bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkoba hamper sama dengan minuman keras, bahkan lebih dahsyat, maka ayat-ayat suci menyangkut minuman keras.

#### 2. Islam Memandang Narkoba

##### a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri dengan tanganmu kedalam kebinasaan” (Qs. Al-Baqarah: 195).

Surah Annisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan. (Qs. Annisa:29)

Surah Al Maidah ayat 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Al-Maidah: 90)

#### b. Hadist

Hadits Ummu Salamah berbunyi:

“Rasulullah SAW melarang dari setiap barang yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan”.

(HR. Ahmad dalam Musnadnya, dan Abu Daud dalam Sunannya, dengan sanad yang sholih).

Hadist dai jabir

“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Sesuatu yang memabukkan, maka sedikitnyapun ( juga ) haram”.

(HR. Ahmad dan Imam).

#### c. Pendapat Ulama

Dengan memperhatikan kata Khamar dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (Khamar, Ganja, Eksstasi, Shabu-Shabu, Patau dan Sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.

Ibnu Taimayah dalam kitannya *As Siyasatu Al-syari'iyah* menyebutkan bahwa: “*Hasyisy* (Narkoba) itu hukumnya dan orang yang meminumnya dikenakan hukuman sebagaimana orang minum khamar”.<sup>28</sup>

#### **D. Pengertian Pengadilan Militer**

Pengadilan Militer adalah pengadilan yang dikhususkan, dasar hukum pengadilan militer adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan

---

<sup>28</sup> *Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Pedoman Pelaksanaan P4GN. h. 75.*



angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Dalam pelaksanaannya peradilan militer dilaksanakan oleh pengadilan militer, Yaitu pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Dan Pengadilan Militer Pertempuran.<sup>29</sup>

Peradilan militer dikhususkan kepada anggota militer dan yang disetarakan dengan militer, dengan dikhususkannya pengadilan militer para anggota militer memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diterapkan dalam kemiliteran. Anggota militer diharuskan memiliki disiplin yang tinggi dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya agar membentuk pribadi militer yang bisa menjadi panutan dalam menegakkan hukum dan melindungi bangsa dan Negara Indonesia dari ancaman luar maupun dari dalam negeri. Dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer diwajibkan melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997: Hak penyidik:

1. Para Anjum Terhadap anak buahnya (Anjum).
2. Polisi militer (POM).
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).

## **E. *Pengetian Tindak Pidana***

### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana atau strafbaarfeit yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan tersebut di sertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi setiap orang

---

<sup>29</sup>Moch. Faisal Salam, *peradilan militer Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju 2004), h. 121.

yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama Lima belas tahun”

Strafbaarfeit atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yaitu:

- a. Straf sendiri diartikan dengan pidana dan hukum.
- b. Baar yaitu dapat atau boleh.
- c. Feit yakni perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah strafbaarfeit adalah peristiwa atau yang dapat dipidana.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli**

- a. Simons berpendapat bahwa,

Tindak pidana atau strafbaarfeit yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>30</sup>

Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, bahwa pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap strafbaarfeit itu sebagai pelanggaran terhadap larangan.

- b. Menurut Moeljatno tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, maka kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

---

<sup>30</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011 h. 97

- c. Menurut Chairul Huda, pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.
- d. Menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana yaitu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- e. Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>31</sup>

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana mengatur tentang tindak pidana. Yaitu untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)

---

<sup>31</sup>Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta :Kencana,2013), h. 27

- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>32</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang.

- a. Teoritis berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- b. sudut pandang undang-undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundangundangan yang ada.

#### **4. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis**

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif yaitu semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.

- a. Unsur Obyektif:

---

<sup>32</sup>*Erdianto Effendi, "Hukum Pidana Indonesia", (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 97.*

- 1) Perbuatan orang.
  - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
  - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.
- b. Unsur Subyektif
- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
  - 2) Adanya kesalahan (dellus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahannya dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur obyektif.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu:

- a. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. *Strafbaarfeit* belum secara resmi memiliki terjemahan resmi, itulah mengapa Andi Zainal Abidin yang seorang ahli hukum pidana Indonesia tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasan beliau tidak sepakat sebagai berikut:
  - a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi pidana.
  - b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak yaitu kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim adalah kata benda selalu diikuti dengan kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.
  - c. Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat eliptis terhadap yang bila diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.<sup>33</sup>

Meskipun para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana, akan tetapi pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud yang terkandung di dalamnya

Menurut Para Ahli Dalam ilmu hukum pidana bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum, dapat dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yakni:

- a. Simons berpendapat bahwa, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum.

---

<sup>33</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, h. 191.

- b. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- c. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- d. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.
- e. Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijke) Sifat melawan hukum adalah salah satu syarat adanya kesalahan.

Agar terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memenuhi empat unsur berikut:

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dilimpah kepadanya.<sup>34</sup>

Yang membedakan perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan arti luas adalah perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam arti sempit, pengertian hukum disini hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang. Sedangkan dalam arti luas yang dimaksudkan dengan hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.

Ada dua Pandangan mengenai perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Pandangan formil Menurut pandangan ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian pengecualian yang telah

---

<sup>34</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkak Education 2012, h. 52-53.*

ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

- b. Pandangan materiil Menurut pandangan ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Sesuai pendapat ini, yang dinamakan hukum itu bukan hanya hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah serta kenyataan kenyataan yang ada dalam suatu masyarakat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. *Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *field research*. *Field research* penelitian lapangan yang digunakan penulis dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulis skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Oditurat Militer IV-17 Makassar. Lokasi penelitian di pilih dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini sangat cocok dan penulis juga menilai sangat cocok dengan judul skripsi yang penulis bahas .Oditurat Militer IV-17 Makassar yang secara teritorial berada di Kota Makassar.

#### **B. *Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum, buku, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian empiris dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Oditurat Militer IV-17 makassar.

#### **C. *Sumber Data***

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil penelitian lapangan yaitu Oditurat Militer IV-17 Makassar, sumber data primer ini adalah hasil dari

wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang dapat langsung dari lokasi penelitian seperti Oditur yang memberikan tuntutan dan pegawai yang menyimpan berkas atau dokumen perkara.

## **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku, literature, artikel hukum, dokumen, KUHP serta KUHPM perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

menjadi objek penelitian.

#### **1. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Penulis melakukan Penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung.

Dalam hal ini, Penulis Wawancara Responden Ketua Oditur Militer IV-17 Makassar, Oditur sebagai penuntut umum yang

#### **2. Studi Pustaka (*Literature Research*)**

Penulis mencari sejumlah data yang diperoleh dari buku literatur, artikel hukum, dokumen, KUHP dan KUHPM serta perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari data primer dan data skunder akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif

yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tugas Pokok Oditur Militer IV-17 Makassar dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap Narkotika) di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 makassar**

Pengadilan Militer atau yang biasa disingkat dengan Dilmil adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat kapten kebawah.

Menurut hemat penulis keterkaitan tugas dan tanggung jawab antara Ankum, Polisi Militer dan Oditur sangat berpengaruh dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh TNI.

Menurut Mayor Chk Hasta Sukidi, SH.,MH Tugas Oditur Militer pada dasarnya sama dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh jaksa pada pengadilan umum. Akan tetapi walaupun banyak persamaan masih pula banyak perbedaan. wewenang jaksa penuntut umum untuk mengadakan pemeriksaan, permulaan atau penyidikan pindah seluruhnya kepada Kepolisian Negara sedangkan dalam peradilan militer hal tersebut menjadi wewenang Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Polisi Militer (POM), dan Oditur. Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Mayor CHK Hasta Sukidi SH., MH, Oditur Militer , *wawancara*, Makassar, 08 Mei 2019

Mayor CHK Hasta Sukidi SH., MH Oditur Militer mengemukakan bahwa oditur mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI.
- b. Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum
- c. Melakukan pemeriksaan tambahan.
- d. Melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas perkara
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan.
- f. Pemanggilan saksi
- g. Menyampaikan pendapat terhadap perselisihan pendapat antara oditur dan papera.

Oditur yang diserahkan tugas untuk melakukan penuntutan, bahwa harus mempersiapkan dan melakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Pemanggilan terdakwa untuk memberitahukan penetapan hari sidang dan pembacaan surat dakwaan , serta mengadakan panggilan kepada saksi-saksi.
- b. Selain surat dakwaan , oditur juga bertugas untuk membacakan surat putusan penyerahan perkara (SKEPPERA) surat penetapan hari sidang, setelah dibacakan kepada terdakwa dibuat berita acaranya , kemudian di tanda tangani oleh terdakwa.

- c. Mempersiapkan barang bukti atau surat-surat bukti untuk di perlihatkan dalam sidang.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di Oditur Militer IV-17 Makassar kasus narkoba merupakan bagian dari Tujuh pelanggaran berat TNI yang sudah pasti mendapat hukuman tambahan berupa pemecatan tidak secara hormat. Selama ini kasus narkoba yang dilaporkan, tertangkap tangan, maupun melalui tes urin oleh polisi militer saat melakukan razia yakni sebagai pengguna narkoba.

Dari beberapa hasil wawancara yang dikemukakan oleh oditur militer IV-17 makassar maka penulis menganalisis bahwa Dalam peranan oditur militer sudah berjalan dengan baik namun dalam pemberian tuntutan kiranya dapat bekerja dengan profesional dengan memberikan tuntutan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum TNI sangat merusak nama kesatuan serta merusak moral bangsa apalagi bahwa seorang TNI harus menjadi panutan bagi masyarakat yang bersih dari perbuatan tindak pidana. Maka tugas pokok oditur militer IV-17 makassar dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba) yaitu Memberikan tuntutan yang seberat-beratnya berupa hukuman pidana penjara dan denda maksimum menurut Undang-Undang kemudian di berikan tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dan di rehabilitasi. Oditur Militer sebagai penuntut umum memberikan tuntutan yang seberat-beratnya bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkoba untuk memberi efek jera bagi prajurit TNI yang melakukan tindak

---

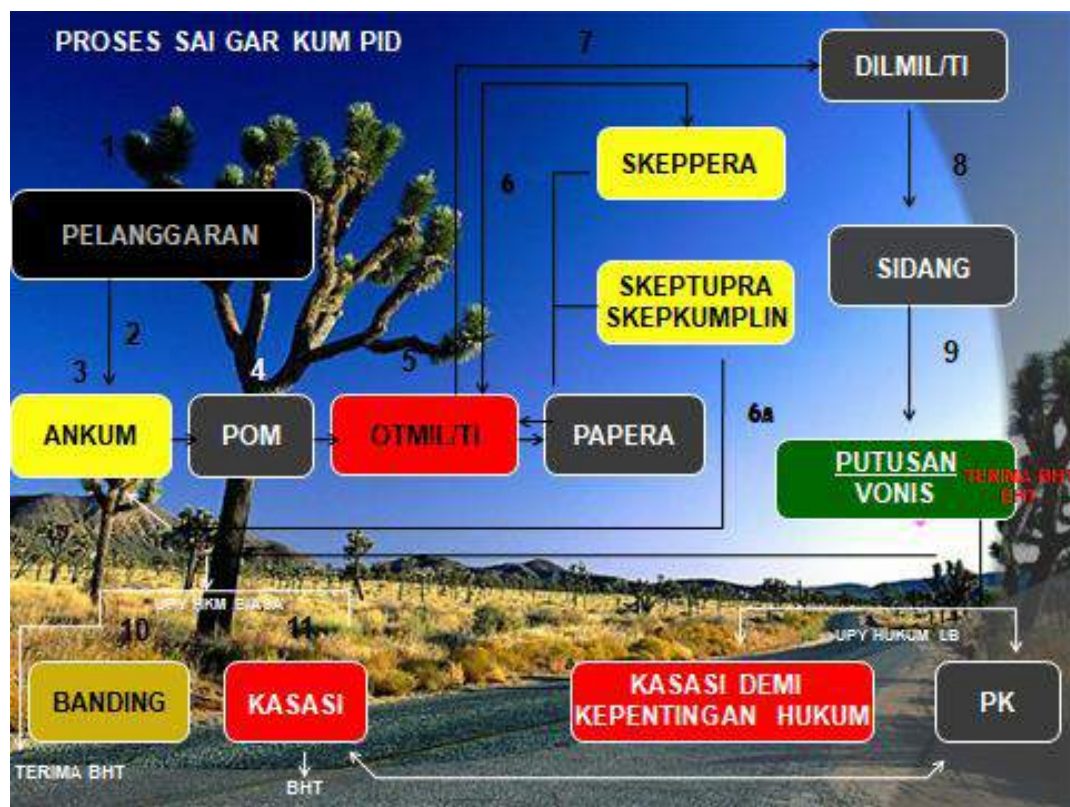
<sup>36</sup> Mayor CHK Hasta Sukidi SH., MH, Oditur Militer, wawancara, Makassar, 08 Mei 2019

pidana narkoba. Diharapkan dengan penjatuhan hukuman yang berat adalah salah satu cara untuk mencegah prajurit TNI untuk mengkonsumsi narkoba, serta dapat memberantas terjadinya penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum pengadilan militer.

**B. Proses Penyelesaian Perkara Prajurit TNI yang Terlibat Penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum pengadilan militer III-16 Makassar**

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana diperlukan suatu mekanisme tersendiri dan dilakukan oleh lembaga hukum tertentu yang ditunjuk dalam undang-undang. Ketika seseorang melakukan tindak pidana maka dia akan ditangkap, ditahan, diselidiki serta ditindaklanjuti dengan proses penyidikan untuk membuktikan keabsahan tindakannya itu. Setelah itu tiba gilirannya memasuki tahap-tahap penyelesaian perkara di sidang pengadilan.

Sebelum masuk tahapan-tahapan proses penyelesaian perkara tindak pidana dilingkungan militer, agar lebih mudah untuk memahaminya lihat pada bagan penyelesaian perkara pidana dilingkungan militer dibawah ini:



Keterangan gambar bagan tersebut:

1. Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI;
2. Hasil pemeriksaan sementara oleh Ankum ada unsur pidana;
3. Ankum serahkan kasus ke POM;
4. Pom menyerahkan hasil penyidikan (BP) kepada Otmil/Ti;
5. Otmil/Ti mengolah perkara dan selanjutnya memberikan pendapat saran hukum tentang penyelesaian perkara kepada PAPER;
6. Apabila PAPER sependapat perkara diselesaikan melalui Pengadilan maka PAPER mengeluarkan Skeppera (surat putusan penyerahan perkara)
- 6A. Di selesaikan melalui Hukum disiplin PAPER mengeluarkan Skep untuk di disiplinkan kepada Ankum;
- 6A. Di selesaikan dengan menutup perkara PAPER (Perwira Penyerah Perkara) mengeluarkan Skep Tuppera;
7. Otmil/Ti menyerahkan berkas perkara dan Skeppera kepada Dilmil/Ti yang dilengkapi dengan Surat Dakwaan dan Berkas perkara;



8. Dilmil/Ti melaksanakan sidang;
9. Putusan Pengadilan
10. Terdakwa / Oditur mengajukan banding; dan
11. Terdakwa / Oditur mengajukan kasasi.<sup>37</sup>

Menurut Mayor Chk Hasta Sukidi, SH., MH Tahap-tahap proses penyelesaian perkara tindak pidana narkoba akan di jelaskan sebagai berikut:<sup>38</sup>

## **1. PENYIDIK DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER**

### **a. Penyidik**

pejabat penyidik yaitu Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), Oditur. Ketiga penyidik tersebut diberi wewenang khusus oleh Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 untuk melakukan penyidikan.

#### **1. Ankum**

Atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang atas dasar Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya.

Hal penting yang perlu digaris bawahi tentang Ankum sebagai Penyidik adalah :

- Penyidik, Ankum tidak melaksanakan proses penyidikan secara langsung tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh POM dan Oditur Militer.
- Disamping Penyidik, Ankum juga sebagai komandan satuan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sehingga memiliki keterbatasan untuk melaksanakan proses penyidikan.

---

<sup>37</sup> Oditurat Milite IV-17 Makassar, 08 Mei 2019

<sup>38</sup> Mayor CHK Hasta Sukidi SH., MH, Oditur Militer, *wawancara*, Makassar, 08 mei 2019

- Sebagai penyidik, Ankuum sebagian besar bukanlah sarjana hukum yang mempunyai pemahaman tentang hukum yang tentunya tidak sepaham POM atau Oditur yang berkualifikasi hukum.

## 2. Polisi Militer (POM).

untuk tugas penyidikan dalam lingkungan ABRI (Militer) dilaksanakan oleh POM dalam satu kecabangan TNI-AD yang dibina oleh Kasad. Dengan berpedoman kepada Keputusan Pangab tersebut maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh Puspomad.

## 3. Oditur (Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi).

Oditurat adalah badan di lingkungan Militer yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima. Oditur di lingkungan Peradilan Militer berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu atas perintah Oditur Jendral, melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara diserahkan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, dan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penyidikan, penyerahan perkara, penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan.

## b. Penyidikan

Salah satu proses terpenting dalam penyelesaian suatu perkara pidana adalah proses penyidikan. Karena pada proses penyidikan inilah, tindakan penyidik ditekankan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana (Pasal 71 UU 31 tahun 1997). Sehingga dari

proses inilah seseorang dapat disangkakan sebagai pelaku sebuah tindak pidana (tersangka) atau bukan.

Proses penyidikan suatu tindak pidana dapat berasal dari berbagai sumber yaitu:

#### 1. Penyelidikan

Penyidik yang mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan penyidikan. Pengetahuan Penyidik tentang adanya tindak pidana itu salah satunya diperoleh dari hasil penyelidikan penyidik, yaitu serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

#### 2. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Apabila yang menerima aduan adalah Ankuam, maka ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada Penyidik (POM). Selanjutnya, Penyidik yang menerima pengaduan wajib segera melakukan penyidikan. Adapun orang yang berhak membuat pengaduan adalah :

- Setiap orang yang menjadi korban tindak pidana
- Setiap orang yang mengalami tindak pidana
- Setiap orang yang menyaksikan tindak pidana
- Setiap orang yang secara langsung mengetahui tentang terjadinya tindak pidana

- setiap orang yang melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang.

### 3. Laporan

Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib saat itu juga melaporkan kepada Penyidik atau Ankum. Laporan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

### 4. Tertangkap tangan

Adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan, membantu melakukan tindak pidana itu.

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap dan wajib menyerahkannya kepada Penyidik, sementara setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap te tersangka dan menyerahkannya kepada Penyidik. Sesudah menerima penyerahan Tersangka, Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

## 2. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

### a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik Militer berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Menurut pasal 75, untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penangkapan. Pelaksanaannya dilakukan dengan surat penangkapan. Untuk menangkap Tersangka yang berada diluar tempat kedudukan Ankum yang langsung membawahkannya, dilakukan oleh Penyidik setempat di tempat mana Tersangka ditemukan berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya.

Untuk dapat dikenakan penangkapan harus didasarkan adanya “bukti-bukti permulaan yang cukup”, sekurang-kurangnya terdiri dari laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
2. Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian perkara; atau
3. Laporan hasil Penyidikan

Terhadap pelaku pelanggaran tidak dapat dikenakan penangkapan kecuali dalam hal tersangka sudah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama 1(satu) hari, yaitu selama 24 (duapuluh empat) jam.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Penyidik atau anggota POM atau anggota bawahan Ankum yang bersangkutan. Penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Ankum, Komandan yang bersangkutan dan dikeluarkan sebelum penangkapan dilaksanakan. Isi surat perintah Penangkapan itu memuat tentang :

1. Identitas Tersangka :
  - a. Nama Lengkap/NRP;

- b. Pangkat/jabatan;
  - c. Tempat/tanggal lahir, Dan lain-lain
- 2. Alasan Penangkapan, seperti:
  - a. Dikhawatirkan melarikan diri
  - b. Dikhawatirkan mengulangi tindak pidana
  - c. Dikhawatirkan menghilangkan alat bukti/barang bukti
- 3. Uraian singkat mengenai kejahatan yang disangkakan dengan menyebutkan;
  - a. Waktu kejahatan dilakukan :
  - b. Tempat kejahatan dilakukan.
  - c. Tempat ia diperiksa

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan, dengan ketentuan segera menyerahkan Tersangka beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik terdekat. Tertangkap tangan berarti tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan; atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Surat perintah penangkapan diserahkan kepada orang yang ditangkap dan tembusannya diberikan kepada keluarganya segera sesudah penangkapan dilakukan. Sesudah penangkapan dilakukan Penyidik wajib segera menyampaikannya kepada Anjak yang bersangkutan.

### **b. Penahanan**

Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik Militer atas perintah Ankum, Papera atau Hakim Ketua Majelis, atau Kepala Pengadilan dengan keputusan/penetapannya dalam hal dan cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang berhak melakukan penahanan itu adalah:

1. Atasan yang Berhak Menghukum
2. Perwira penyerah Perkara
3. Hakim Ketua Majelis; dan
4. Kepala pengadilan.

Penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Ankum/Papera/Penetapan Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan perkara/Kepala Pengadilan, baik Pengadilan Militer, pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama atau Pengadilan Militer Pertempuran.

Kewenangan Ankum menahan selama 20 hari sedangkan kewenangan Papera untuk melakukan penahanan adalah 30 hari dan dapat melakukan perpanjangan penahanan paling lama 180 hari, dengan setiap kali melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari. Dengan demikian jumlah keseluruhan lamanya penahanan adalah 200 hari. Lamanya waktu penahanan tersebut adalah untuk proses penyidikan dalam mencari bukti yang sah dan meyakinkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Adapun alasan penahanan tersebut adalah :

1. Dikhawatirkan tersangka melarikan diri.
2. Dikhawatirkan tersangka menghilangkan barang bukti.
3. Dikhawatirkan tersangka mengulangi perbuatannya.

4. Dikhawatirkan tersangka membuat keonaran.

Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 bulan atau lebih. Penahanan atau perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan surat perintah, atau berdasarkan surat keputusan penahanan, atau surat keputusan perpanjangan penahanan. Dalam surat itu harus dicantumkan :

1. identitas tersangka;
2. Alasan penahanan;
3. Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan;
4. Tempat ia akan ditahan.

Pada waktu melaksanakan penahanan Surat Perintah Penahanan/Keputusan Penahanan/Perpanjangan Penahanan diserahkan kepada tersangka dan tembusannya diberikan kepada keluarganya. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Militer (RTM) atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima.

Terhadap penahanan/perpanjangan penahanan dapat ditangguhkan atas permintaan Tersangka, untuk itu permintaan ditujukan kepada pihak yang melakukan penahanan (Penyidik). Atas dasar permintaan itu Ankum atau Papera sesuai dengan kewenangan kewenangan masing-masing berdasarkan saran Polisi Militer atau Oditur dapat mengadakan penangguhan penahanan, adapun syaratnya adalah :

1. Persyaratan Umum:
  - a. tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan;
  - b. tidak melarikan diri;



- c. tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; atau
- d. tidak mengulangi melakukan tindak pidana

## 2. Persyaratan khusus

Memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan oleh Ankum atau papera, misalnya wajib lapor.

## 3. **PENYERAHAN PERKARA**

Papera atas dasar Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada dibawah komandonya diserahkan kepada Pengadilan Militer. Perwira penyerah perkara terdiri dari :

- a. Panglima TNI
- b. Kepala Staf TNI AD, TNI AL, TNI AU

Perwira Penyerah Perkara diatas dapat menunjuk Komandan/Kepala satuan bawahan masing-masing, paling rendah setingkat dengan Jabatan Komandan Komando Resort Militer (Danrem) disesuaikan dengan ketentuan tingkat jabatan (Nevelering) yang berlaku dilingkungan TNI. Perwira Penyerah Perkara berwenang untuk :

- a. Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
- b. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
- c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa (menghadapkan seseorang diluar kemauannya ke hadapan penyidik);
- d. Memperpanjang penahanan;
- e. Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;

- f. Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili (memerintahkan Oditur agar perkara tersebut dilakukan penuntutan di persidangan pengadilan);
- g. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Selesai melakukan penyidikan, maka Penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Oditur. Setelah menerima berkas Oditur mempelajari dan meneliti hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau belum? Apabila persyaratan formal belum lengkap maka Oditur meminta Penyidik untuk segera melengkapinya. Permintaan itu itu disampaikan secara tertulis atau lisan. Atau apabila hasil penyidikan belum cukup, maka Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi. Atau dapat pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Dalam hal demikian Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Oditur dan menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Oditur.

Sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada perwira Penyerah Perkara, isinya dapat berupa permintaan yaitu agar :

- a. Perkara diserahkan kepada pengadilan;
- b. Diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit;
- c. Ditutup demi kepentingan Hukum, Umum atau Militer.

Apabila Papera tidak sependapat dengan Oditur, maka ia wajib memberikan jawaban secara tertulis. Isinya mengenai pertimbangan terhadap pendapatnya yang menjadi dasar pengajuan perbedaan pendapat dengan Oditur ke Pengadilan Militer Utama untuk diputuskan. Dengan dasar pendapat hukum Oditur tersebut, Papera mengeluarkan :

**1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara.**

Isinya bahwa perkara diserahkan kepada pengadilan yang berwenang melalui Oditur, sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara bersangkutan di persidangan Pengadilan dan tembusannya diserahkan kepada tersangka;

**2. Surat keputusan Penyelesaian Menurut Hukum Disiplin Prajurit.**

Isinya agar kasus tersebut diselesaikan menurut hukum disiplin Prajurit, ini diserahkan kepada Ankum melalui Oditur supaya Ankum menjatuhkan hukuman disiplin prajurit

**3. Surat keputusan Perkara Ditutup Demi Kepentingan Hukum.**

Isinya menyatakan, bahwa perkara itu ditutup demi kepentingan hukum dan ini diserahkan kepada Oditur sebagai dasar penyelesaian perkara. Tembusannya disampaikan kepada Ankum, Penyidik, Tersangka atau penasihat Hukumnya. Apabila tersangka ditahan, maka Oditur wajib segera membebaskannya dan apabila terdapat barang bukti, maka Oditur wajib segera mengembalikannya kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak.

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Papera dan Oditur mengenai penyelesaian suatu perkara, maka Oditur mengajukan permohonan kepada Papera supaya perbedaan pendapat tersebut diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama

dalam sidang. Untuk itu dalam permohonan itu Oditur mengemukakan alasan-alasannya

#### **4. PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN**

Dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Militer, Hakim Militer sesuai dengan mekanisme beracara di Pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, para saksi dan barang bukti sesuai dengan surat dakwaan guna mencari kebenaran materiil.

- a. Dalam pemeriksaan di pengadilan terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana Militer, yaitu :

1. Terdakwa dan Terpidana.

Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Artinya orang tersebut sedang dalam proses persidangan sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Terpidana adalah seorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi dalam waktu *7 hari* setelah diputuskan oleh pengadilan TK-I atau dalam waktu *14 hari* setelah diputuskan oleh pengadilan TK-II (banding) atau pada Tingkat Kasasi *sejak saat itu* juga setelah diputuskan tidak ada upaya hukum lagi. Batas waktu untuk melakukan upaya hukum tersebut termasuk hari libur (Hari Minggu atau Hari Libur Nasional).

1. Saksi

Yang dimaksud saksi disini adalah orang yang mengalami sendiri, melihat sendiri, atau mendengar sendiri adanya suatu tindak pidana.

## 2. Ahli

Ahli yang dimaksud adalah ahli yang sesuai dengan kemampuan dalam bidangnya. Kehadiran ahli jika diperlukan.

## 3. Penuntut Umum

Yaitu Oditur militer dan Oditur militer tinggi

## 4. Penasihat Hukum

Menurut UU No. 31 Tahun 1997 Penasihat hukum disediakan oleh satuan.

## 5. Hakim

Terdiri dari Hakim militer, Hakim Militer tinggi, dan Hakim Tetap. Hakim bertugas mengadili yaitu memeriksa dan memutuskan perkara.

## 6. Panitera

Panitera bertugas membantu hakim dalam melaksanakan tugasnya di dalam persidangan yaitu mencatat segala kejadian dalam sidang. Artinya Panitera diberi wewenang oleh undang-undang terhadap apa yang terjadi di dalam sidang untuk dicatat, sehingga apabila ada banding hakim tinggal menerima catatan selama sidang dari panitera dalam bentuk berita acara.

## 7. Ankuam

Dalam perkara pidana Ankuam diberi wewenang untuk menahan selama 20 hari.

## 8. Papera

a. Di dalam KUHAPMIL papera diberi wewenang :

1. Memperpanjang penahanan tersangka untuk kepentingan penyidikan. Papera memiliki wewenang untuk memperpanjang penahanan selama 30 hari setiap kali masa penahanan dan dapat memperpanjang masa penahanan sebanyak 6 kali. Jadi Papera dapat menahan tersangka selama 180 hari. Dengan

demikian jumlah maksimum tersangka dapat ditahan mulai dari Ankum sampai dengan Papera adalah 200 hari.

2. Menyerahkan perkara ke pengadilan dengan Skep Papera (Skeppera).
  3. Menutup perkara demi hukum dan/atau kepentingan umum, dan/atau kepentingan militer.
  4. Mengembalikan perkara kepada Ankum untuk diselesaikan menurut hukum disiplin (Skepkumplin).
- b. Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.
1. Mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh :
    - a. Militer atau prajurit.
    - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
    - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
    - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
  2. Mengadili sengketa Tata Usaha Militer.
  3. Mengadili penggabungan gugatan dan ganti rugi dalam perkara pidana.
  4. Mengadili tindak pidana :
    - a. Yang terjadi dalam daerah hukumnya.

- b. Kesatuan Terdakwa dalam daerah hukumnya.
- c. Penyelesaian perkara pidana bagi personil TNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

Apabila terjadi hal yang demikian maka yang diterapkan adalah Hukum Pidana Militer Indonesia. Hal ini berkaitan dengan *asas personalitas militer* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 KUHPM, yang pada dasarnya menyatakan bahwa *kemanapun militer pergi, selalu membawa hukumnya*. Tidak dipandang apakah yang dilakukan berupa *kejahatan* atau *pelanggaran* yang jelas bagi militer itu semua merupakan suatu tindak pidana. Selanjutnya mengenai tempat untuk mengadili prajurit tersebut adalah *kesatuan Terdakwa dalam daerah hukumnya*.

#### d. Tahap-tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan

1. Persiapan menghadapi tahap pemeriksaan di persidangan
  - a. Kaotmil/Kaotmilti berdasarkan penetapan sidang mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi dengan mencantumkan waktu dan tempat sidang. Surat panggilan tersebut harus sudah diterima oleh Terdakwa dan para saksi selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang.
  - b. Selanjutnya Kaotmil/kaotmilti menunjuk Oditur yang akan bersidang, dan menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada Oditur yang ditunjuk tersebut.
  - c. Oditur yang ditunjuk tersebut setelah selesai membuat surat dakwaan dan sudah dinyatakan sempurna maka menyerahkan surat dakwaan tersebut ke Pengadilan Militer selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

- d. Semenjak perkara dilimpahkan ke pengadilan militer, maka kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan yang menangani perkara tersebut.

## 2. Pelaksanaan Sidang

## 3. Pembukaan Sidang

Sidang dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan, untuk itu Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara pidana yang mencakup masalah kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara.

Setelah sidang dibuka maka hakim memerintahkan Oditur supaya Terdakwa masuk ruangan sidang dengan pengawalan tujuannya adalah demi pengamanan terhadap diri Terdakwa dan supaya Terdakwa tidak melarikan diri. Dalam hal Terdakwa tidak ditahan dan tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, hakim ketua majelis meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah, jika tidak sah maka hakim ketua majelis menunda persidangan dan memerintahkan Oditur untuk memanggil Terdakwa untuk hadir pada sidang berikutnya.

## 4. Pembacaan Surat Dakwaan dan Keberatan

Tahap selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan, terhadap dakwaan Oditur, Terdakwa atau Penasihat Hukum berhak mengajukan keberatan, dan untuk selanjutnya Oditur menanggapi keberatan dan menyatakan pendapat atas keberatan Terdakwa atau Penasihat Hukum.

## 5. Pemeriksaan Saksi



Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan saksi, Oditur menghadapkan Saksi-saksi kedepan Majelis Hakim. Saksi-saksi tersebut untuk selanjutnya diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, untuk selanjutnya Oditur maupun Terdakwa/Penasihat Hukum diberi kesempatan oleh Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Bagi saksi yang tidak dapat hadir dengan alasan yang sah maka Oditur dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan. Selama pemeriksaan Oditur berhak mengajukan permintaan saksi tambahan. Apabila saksi yang diperiksa terdapat indikasi memberikan keterangan palsu, maka Oditur dapat mengajukan permohonan kepada hakim ketua untuk melaporkan saksi tersebut ke Penyidik.

#### 6. Pemeriksaan Terdakwa

Dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa dan selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur dan Penasihat Hukum.

#### 7. Pemeriksaan Barang Bukti

Barang bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dan Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta menanyakan perihal barang bukti tersebut guna mencari kebenaran materil hubungan barang bukti dengan perkara untuk memperoleh kejelasan tentang peristiwanya.

#### 8. Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik

Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur untuk membacakan tuntutan, setelah itu hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum untuk menanggapi tuntutan Oditur berupa Pembelaan. Pembelaan tersebut dapat dibacakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum secara sendiri-sendiri atau hanya oleh Penasihat Hukum saja. Terhadap pembelaan dari

Terdakwa atatau Penasihat Hukum, Oditur dapat mengajukan jawaban (replik). Selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat mengajukan tanggapan atas jawaban Oditur (duplik).

Setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup kemudian menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah guna mengambil putusan. Hakim Ketua karena jabatan atau atas permintaan Oditur, Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat membuka sidang sekali lagi untuk menampung fakta tambahan sebagai bahan musyawarah Hakim.

#### 9. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. Apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan sesuatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari dari segala tuntutan hukum.

#### 10. Pengucapan Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tersebut ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan. Biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa jika isi putusan memidana Terdakwa, apabila Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Sebelum sidang pengadilan ditutup oleh Hakim Ketua dengan ketukan palu 3 kali, Hakim Ketua wajib memberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur tentang haknya, yaitu:

1. Hak menerima atau menolak putusan

Hak mempelajari putusan sebelum menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan diucapkan. Bila tenggang waktu lewat dan Terdakwa atau Oditur tidak menyatakan sikap/pendapatnya maka Terdakwa atau Oditur dianggap menerima.

2. Hak mengajukan Banding dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diucapkan.

3. Hak mengajukan Grasi apabila menerima putusan dalam hal Terdakwa dijatuhi pidana serendah-rendahnya dua tahun atau dijatuhi pidana mati.

4. Hak mencabut pernyataan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diucapkan.

Petikan putusan diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Oditur segera setelah putusan diucapkan. Salinan putusan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer, Anjum. Sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan. Petikan putusan dan salinan putusan dikirim kepada Mahkamah Agung dan Dikmiltama pada kesempatan pertama.

## 5. UPAYA HUKUM

Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pertama/Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir atau tingkat banding atau

tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

#### a. Upaya Hukum Biasa

##### 1. Banding

Upaya hukum banding dalam Peradilan Militer adalah hak Terdakwa atau Oditur untuk memohon supaya putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi) diperiksa kembali oleh Pengadilan Militer Tingkat Banding (Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama). Tujuannya adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kesalahan/kekhilafan pada putusan tingkat pertama.

Pemohon banding adalah Terdakwa atau Oditur, untuk waktu memintakan banding adalah 7 hari sesudah putusan dijatuhkan (dalam hal Terdakwa hadir di persidangan) atau sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir. Penghitungan waktu 7 hari itu dimulai pada hari itu juga bila Terdakwa hadir .

##### 2. Kasasi

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan Pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan terakhir. Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan. Permohonan kasasi ditujukan oleh Pemohon kepada

Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama. Adapun tenggang waktu pengajuan kasasi adalah dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Terhadap semua putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan dapat diajukan 1 kali permohonan kasasi oleh Oditur Jenderal, hakikat kasasi demi kepentingan hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang sudah dilakukan agar tidak merugikan para pihak. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Oditur Jenderal kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Peradilan yang sudah memutus perkara pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir

2. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap semua putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Permintaan Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung dan hanya dapat dilakukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya saja.

## **6. PELAKSANAAN PUTUSAN**

Pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam lingkungan Peradilan Militer adalah Oditur sesuai dengan kewenangannya.

a. Cara-cara pelaksanaan Putusan Pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Pidana penjara atau pidana kurungan, termasuk pidana kurungan pengganti denda, dilaksanakan di Pemasyarakatan Militer atau ditempat lain menurut ketentuan yang berlaku.
2. Terpidana yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum, sekalipun keputusan pemecatan dari dinas militer belum terbit.
3. Terhadap putusan pengadilan yang amar putusannya menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka Oditur segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan apabila Terdakwa ditahan.
4. Terpidana yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan lebih dari satu putusan sejenis, maka dilaksanakan secara berturut-turut dan berkesinambungan.
5. Terpidana yang dijatuhi pidana denda, maka pembayaran denda dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda. Apabila Terpidana tidak mampu membayar denda maka pelaksanaan subsidair berupa pidana kurungan dilaksanakan berlanjut setelah masa pidana pokok telah selesai dilaksanakan.
6. Putusan pengadilan menetapkan barang bukti antara lain :
  - a. Dirampas untuk Negara
  - b. Dikembalikan kepada yang paling berhak
  - c. Dirampas untuk dimusnahkan
7. Kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Terpidana.

8. Apabila Terpidana lebih dari satu orang karena melakukan tindak pidana secara bersama-sama, diwajibkan membayar biaya perkara secara tanggung renteng.
9. Jika Terpidana dalam waktu yang ditentukan undang-undang mengajukan grasi kepada Presiden, maka pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana tetap dilaksanakan kecuali terhadap putusan pidana mati.
10. Putusan banding maupun putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan oleh Oditur pada Pengadilan tingkat pertama.

**a. Pelaksanaan Pidana Pokok**

1. Yang bertanggung dalam pelaksanaan pidana mati, adalah Oditur sesuai aturan undang-undang.
2. Pidana penjara atau kurungan yang tidak disertai dengan pemecatan dari dinas militer dilakukan oleh Oditur dengan menyerahkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Militer.
3. Pelaksanaan Pidana penjara atau kurungan yang disertai dengan pemecatan dari dinas militer dilakukan oleh Oditur dengan menyerahkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Umum.
4. Pelaksanaan pidana percobaan dilakukan oleh Oditur dengan menyerahkan terpidana kepada Ankumnya.
5. Pelaksanaan pidana denda dilakukan oleh Oditur dan wajib dibuatkan bukti penerimaan.

**b. Pelaksanaan Pidana Tambahan**

Pelaksanaan Pidana Tambahan sesuai dengan amar putusan pengadilan dilakukan oleh Oditur, selanjutnya salinan putusan tersebut dikirim kepada Papera untuk ditindak lanjuti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tugas Pokok Oditur Militer VI-17 Makassar dalam P4GN ( Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika )
  - a. Melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum
  - c. Melakukan pemeriksaan tambahan.
  - d. Melakukan penyidikan .
  - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan.
  - f. Pemanggilan saksi
  - g. Menyampaikan pendapat terhadap perselisihan pendapat antara oditur dan papera.
2. Proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang di lakukan oleh prajurit TNI
  - a. Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI , baik tertangkap tangan maupun melalui tes urin
  - b. Hasil pemeriksaan sementara oleh Ankum ada unsur pidana;
  - c. Ankum serahkan kasus ke POM untuk melakukan pemeriksaan, Pom menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada Otmil/Ti;



- d. Otmil/Ti mengolah perkara, apabila sudah memnuhi syarat materil maka di buatkan bapat sph (berita acara pendapat dan syarat pendapat hukum dari oditur) , tetapi apabila belum lengkap di kembalikan ke penyidik, apabila sudah terpenuhi maka di serahkan ke PAPERA;
- e. Apabali PAPERA sependapat perkara diselesaikan melalui Pengadilan maka PAPERA mengeluarkan Skeppera, dalam waktu 14 hari. Di anjurkan untuk segera mengirimkan Skeppera.
- f. Di selesaikan melalui Hukum disiplin PAPERA mengeluarkan Skeppera untuk di disiplinkan kepada Ankum;
- g. Di selesaikan dengan menutup perkara PAPERA mengeluarkan Skep Tuppera; jika skeppera telah selesai maka akan di serahkan kembali ke otmil, kemudian oditur militer surat dakwaan
- h. Otmil/Ti menyerahkan berkas perkara dan Skeppera kepada Dilmil/Ti yang dilengkapi dengan Surat Dakwaan dan Berkas perkara;
- i. Dilmil/Ti melaksanakan sidang;
- j. Putusan Pengadilan
- k. Terdakwa / Oditur mengajukan banding;dan
- l. Terdakwa / Oditur mengajukan kasasi.

## **B. Saran**

Agar memperbaiki penegakan hukum kedepan, khusunya dalam peranan oditur militer dalam P4GN ( Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba ) yang di lakukan oleh prajurit TNI , Maka penulis mengajukan beberapa saran yakni:

- a. Oditur militer dalam menetapkan tuntutan pidana agar bersikap professional sehingga akan tercapai rasa keadilan terhadap penegakan hukum dan diharapkan tuntutan pidana yang ditetapkan oleh oditur militer benar-benar pantas dan sesuai dengan perbuatan terdakwa.
- b. Faktor peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personil TNI.
- c. TNI yang menyalahgunakan narkoba selain di beri hukuman pidana penjara serta hukuman denda, dan berupa hukuman tambahan berupa pemecatan, seharusnya di rehabilitasi agar prajurit yang menggunakan narkoba menjalani proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba serta pemulihan baik fisik maupun mental. Agar prajurit TNI yang pernah melakukan penyalahgunaan narkoba dapat melaksanakan fungsi social dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi*), Jakarta : Chandra Pratama, 1996.

Ali, Muhammad Imran. *Efektivitas Kinerja Bnnp Sulsel*, Makassar: 2016.

D, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1987

Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Faisal, Moch. Salam, *peradilan militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2004.

Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2013.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkak Education 2012.

Nurlia, Ani. Kamryah Amiruddin, dkk., *Narkoba Barang Haram Yang Mematikan Berantas Narkoba Harus Sepenuh Hati*, SKM Matahari Timur, 2005.

O.S., Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: PT Gelora Aksara, 2014.

Prakoso, Djoko. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* Bandung: Maju Mundur, 2003.

Sjarit, Amiroeddin. *Hukum Disiplin militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sumaperwata, Mulya. *Hukum Acara Peradilan Militer*, Bogor : Alumnus Press, 2007.

Taufik Makarao, Moh. *Tindak Pidana Narkotika* Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003

### **Undang-Undang**

Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

**Sumber Lain:**

Atmasasmita, Romli. *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan*, Jurnal Hukum Prioris, 2012.

Ismail, Wahyuni. *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Al-Qalb Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang, 2014.

Rasdianah dan Fuad Nur. *Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, 2018. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/6282/5614>

Muh. Amiruddin, *Jurnal : Pembuktian dalam Tindak Pidana Lalu Lintas. Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makassar*.  
<http://Journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/view/5438>.

<http://www.bnn.go.id/pressrelease/13087/hari-anti-narkotika-internasional>, terakhir diakses 1 Mei 2016, pukul 12.00 WIT./

<http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para-ahli.html>. Diakses tanggal 30 mei 2018

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Aslinda Rahayu**, Lahir pada tanggal 25 Juni 1997, Penulis merupakan anak keempat dari pasangan H.Ilyas dan Astaty. Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SD NEGERI 033 PELITAKAN (2002-2008), lalu melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP NEGERI 2 WONOMULYO (2008-2011), kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMK YPPP WONOMULYO (2011-2014), setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum (2015-2019).

# LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/03/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gatot Heru Prasetyo, S.H.  
Pangkat/ NRP : Kolonel Chk / 1930006761067  
Jabatan : Kaotmil IV-17 Makassar

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Aslinda Rahayu**  
Nim : 10400115050  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl.Tamangapa Raya  
Judul Skripsi : "Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar."

Yang tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dengan baik di "ODITURAT MILITER IV-17 MAKASSAR" dalam rangka penyusunan dan penulisan Skripsinya terhitung mulai tanggal 26 April 2019 sampai dengan 26 Mei 2019.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 25 Juli 2019

Kepala Oditur Militer IV-17,



Gatot Heru Prasetyo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 1930006761067